

**KEBIJAKAN PT. KAI DAOP 7 STASIUN MADIUN  
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG ASONGAN  
GUNA PENINGKATAN PELAYANAN  
KERETA API**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Minat Utama: Hukum Kebijakan Publik**



**Disusun oleh:**

**DIMAS PRAMODYA DWIPAYANA**

**NIM. S311302002**

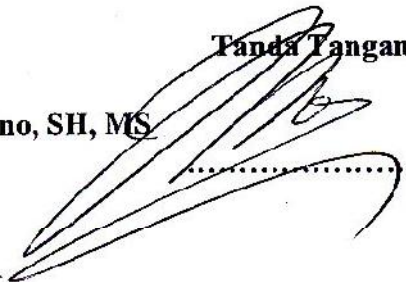
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2017**

**KEBIJAKAN PT. KAI DAOP 7 STASIUN MADIUN DALAM  
PENERTIBAN PEDAGANG ASONGAN GUNA PENINGKATAN  
PELAYANAN KERETA API.**


Disusun Oleh :

**DIMAS PRAMODYA DWIPAYANA**  
NIM. S311302002

Telah Disetujui Oleh Pembimbing :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Dr. Djoko Wahyu Winarno, SH, MS		24/1/17

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

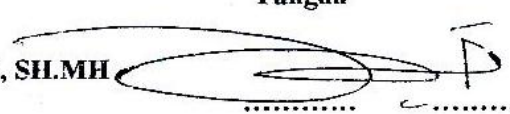



  
**Dr. Hari Purwadi, SH, M.Hum**  
NIM. 19641201 200501 1 001

**KEBIJAKAN PT. KAI DAOP 7 STASIUN MADIUN  
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG ASONGAN  
GUNA PENINGKATAN PELAYANAN  
KERETA API**

Disusun Oleh :

**DIMAS PRAMODYA DWIPAYANA  
NIM. S311302002**

Telah Disetujui Oleh Tim Penguji :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, SH.MH NIP: 197210082005012001		.....
Sekretaris	Dr. Lego Karjoko, SH.MH NIP: 196305191988031001		.....
Anggota Penguji	1. Dr. Djoko Wahyu Winarno, SH.MS NIP: 1952051111980631002		.....
	2. Dr. Hari Purwadi, SH.MHum NIP: 196412012005011001		.....

Mengetahui

**Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Sebelas Maret**



**Prof. Dr. M. Furqon, M.Pd**  
NIP: 19206130740374837



**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret**



**Dr. Hari Purwadi, SH, M.Hum**  
NIP: 196412012005011001

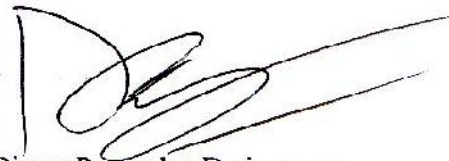


## PERNYATAAN

**Nama : DIMAS PRAMODYA DWIPAYANA**  
**NIM : S311302002**

**Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis berjudul : KEBIJAKAN PT. KAI DAOP 7 STASIUN MADIUN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG ASONGAN GUNA PENINGKATAN PELAYANAN KERETA API adalah betul karya sendiri. Hal-Hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis ini. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian tesis saya, dengan ini saya bersedia di-*upload* atau dipulikasi *website* Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Surakarta, 6 Juni ..... 2017  
yang membuat pernyataan



Dimas Pramodya Dwipayana  
NIM. S311302002

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ( Tesis ) yang berjudul **KEBIJAKAN PT. KAI DAOP 7 STASIUN MADIUN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG ASONGAN GUNA PENINGKATAN PELAYANAN KERETA API** ini dengan tepat waktu guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa untuk terselesaikannya penulisan hukum ini, banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan yang berupa bimbingan, saran-saran, nasihat-nasihat, fasilitas, serta dukungan moril maupun materiil. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang telah berkenaan memberikan waktu, ilmu dan motivasi dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Djoko Wahyu Winarno, SH,MS selaku Dosen Pembimbing penulis tesis, yang telah berkenaan memberikan waktu dan ide, memeberikan arahan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.
7. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Bapak Wahyu Priyanto, S.E dan Ibu Anggri Nurfeni, S.Pd., M.Pd Terkasih yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, semangat dan mendoakan penulis, hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Tiada kata selain ucapan terima kasih dan semoga ananda dapat memenuhi harapan kalian untuk dapat mengejar cita-cita demi masa depan.
9. Teman-teman di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2013 serta teman-teman senasib seperjuangan dalam mengerjakan penulisan hukum ini, terima kasih atas segala informasi yang dapat mendukung dan membantu penulis.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam Tesis ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan kesempurnaan Tesis ini. Akhirnya Penulis berharap hasil Penulisan Hukum ( Tesis ) ini dapat memberikan manfaat pada pihak-phak yang berkepentingan.

Surakarta, ..... 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	11
1. Teori Kebijakan .....	11
a. Kebijakan Publik.....	11
b. Implementasi Kebijakan .....	13
c. Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik .....	27
B. Sejarah Perusahaan.....	32
1. Sejarah Perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).....	32
2. Visi, Misi, dan Tujuan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	37
3. Budaya PT. Kereta Api Indonesia (Persero).....	38
4. Tinjauan Umum Tentang Kereta Api Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 .....	39
5. Kebijakan Undang-Undang Perkeretapian .....	44
C. Pelayanan Publik .....	48
1. Pengertian Pelayanan.....	48
2. Pengertian Pelayanan Publik .....	49

	3. Unsur-unsur Pelayanan Publik .....	50
	4. Azas, prinsip dan standar pelayanan publik .....	51
	5. Jenis- jenis Pelayanan Publik.....	54
	6. Penyelenggaraan Pelayanan Publik .....	55
	7. Manajemen Pelayanan Publik.....	57
	D. Tinjauan Tentang Pedagang Asongan .....	60
	E. Teori Bekerjanya Hukum .....	61
	F. Kerangka Pikir.....	64
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian .....	66
	B. Lokasi Penelitian .....	68
	C. Jenis Data.....	68
	D. Sumber Data .....	69
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	70
	F. Validitas Data .....	72
	G. Teknik Analisis Data .....	72
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Kebijakan PT. KAI Daop 7 Madiun dalam penertiban Pedagang Asongan .....	77
	B. Permasalahan yang dihadapi PT. KAI DAOP 7 Stasiun Madiun dalam Penertiban Pedagang Asongan serta solusinya	90
	C. Dampak Kebijakan PT KAI terhadap Pelayanan Publik.....	99
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	103
	B. Implikasi .....	104
	C. Saran .....	104
	DAFTAR PUSTAKA .....	105



## ABSTRAK

**Dimas Pramodya Dwipayana. S3112002. 2017. Kebijakan PT. KAI Daop 7 Stasiun Madiun Dalam Penertiban Pedagang Asongan Guna Peningkatan Pelayanan Kereta Api. Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan apakah yang dikeluarkan oleh PT. KAI DAOP 7 Stasiun Madiun dalam penertiban pedagang asongan guna peningkatan pelayanan kereta api disamping itu untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi PT. KAI DAOP 7 Stasiun Madiun dalam penertiban pedagang asongan serta bagaimana solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum non doktrinal yang termasuk dalam penelitian sosiologis empiris. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif-analitis. Lokasi penelitian ini adalah PT. KAI DAOP 7 Stasiun Madiun atas pertimbangan bahwa lembaga ini sedang menangani penertiban pedagang asongan guna peningkatan pelayanan kereta api. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis data interaktif (*Interactive Model Of Analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, kebijakan yang dikeluarkan oleh PT. KAI DAOP 7 Stasiun Madiun dalam penertiban Pedagang Asongan guna peningkatan pelayanan kereta api berdasarkan : Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 29 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum KA Menjadi Perusahaan Perseroan; Peraturan Presiden No 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian; Pasal 2 ayat (1) huruf b UU 19 Tahun 2013 tentang BUMN. Kedua adalah permasalahan yang dihadapi PT. KAI DAOP 7 Stasiun Madiun dalam Penertiban Pedagang Asongan serta solusinya, yaitu : munculnya rasa tidak puas dari pedagang asongan yang merasakan kehilangan mata pencaharian dan munculnya gejala dari Pedagang Asongan dengan melakukan protes atau demo yang berdampak pada ketidaknyamanan penumpang Kereta Api. Untuk solusi yang dilakukan oleh pihak PT. KAI adalah dengan melakukan pendekatan persuasif, melakukan pembinaan-pembinaan sehingga timbul pengertian dari pihak Pedagang Asongan.

Kata kunci: kebijakan penertiban, pedagang asongan, pelayanan kereta api.

## **ABSTRACT**

*The objectives of this research were to find and to analyze the policy issued by Madiun Station of PT. KAI DAOP 7 in ordering the street vendors to improve the train service. beside that, it was to find out and to analyze the problems encountered by Madiun Station of PT. KAI DAOP 7 in ordering the street vendors and the solution to it. This research employed non-doctrinal law research belonging to sociological empirical research. This study also employed qualitative approach, the procedure of research resulting in descriptive analytical data. This research was taken place in Madiun Station of PT. KAI DAOP 7 considering that this institution was dealing with the organization of street vendors to improve the train service. Technique of analyzing data used was an interactive model of analysis. The result of research showed that: firstly, the policy issued by Madiun Station of PT. KAI DAOP 7 in ordering street vendors in order to improve the train service was based on the Communication Minister's Decree No. KP 29 of 2010; Government Regulation No.9 of 1998 about the Conversion of Train Public Company into Limited Incorporation; Presidential Regulation No.53 of 2012 about Public Service Obligation and Pilot Transportation Subsidy in Train Division; Article 2 clause (1) letter b of Law 19 of 2013 about State-Owned Enterprises. Secondly, the problem encountered by the Madiun Station of PT. KAI DAOP 7 in ordering the street vendors was the dissatisfaction of street vendors losing their livelihood expressed in protest and demonstration impact on the train passengers' discomfort. The solution taken by PT.KAI to this problem was to take persuasive approach by means of building and educating the street vendors so that they could understand it.*

*Keywords: Ordering Policy, street vendors, train service*